

Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Di Kota Dumai Provinsi Riau

¹Artika Pertasari, ²Febri Yuliani, ³Hasim As'ari

^{1,2,3}Universitas Riau

Korespondensi : artika.pertasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari permasalahan penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan serta adanya aktivitas yang merusak ekosistem laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana kesiapan dalam menerapkan kebijakan tersebut, khususnya di wilayah perikanan Provinsi Riau. Dalam pendekatan output control ini, penangkapan ikan dibatasi melalui penetapan kuota, sehingga kapal yang mengantongi izin tidak lagi diperbolehkan menangkap ikan secara tidak terbatas yang dapat melampaui kapasitas sumber daya perikanan. Selain itu, aspek krusial dari implementasi kebijakan baru ini adalah kewajiban bagi kapal perikanan berizin untuk mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan. Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Dumai secara umum sudah siap mengimplementasikan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap aturan yang ada dan adanya upaya pengawasan yang dilakukan. Namun terdapat beberapa temuan yang berkaitan dengan kendala implementasi seperti koordinasi antara instansi pusat dan daerah dan keterbatasan infrastruktur seperti pengembangan pelabuhan, peningkatan sistem informasi berbasis teknologi, dan pelatihan nelayan. Dengan memperkenalkan teknologi modern dan meningkatkan fasilitas operasional, implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Penangkapan Ikan.

Abstract

This study is based on the problem of excessive fishing and activities that damage the marine ecosystem. The purpose of this study is to examine the extent of readiness to implement the policy, especially in the fisheries area of Riau Province. In this output control approach, fishing is limited by setting quotas, so that vessels with permits are no longer allowed to catch fish indefinitely which can exceed the capacity of fishery resources. In addition, a crucial aspect of the implementation of this new policy is the obligation for licensed fishing vessels to land their catches at designated fishing ports. Data analysis techniques in this study include data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the Dumai City government is generally ready to implement the Measured Fishing policy well. This is indicated by the understanding of the Dumai City Government in this case the Fisheries and Marine Service of the existing regulations and the supervision efforts made. However, there are several findings related to implementation constraints such as coordination between central and regional agencies and infrastructure limitations such as port development, improving technology-based information systems, and training fishermen. By introducing modern technology and improving operational facilities, the implementation of measured fishing policies can be more effective, transparent, and sustainable.

Keyword: Implementation, Policy, Fishing.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara maritim dengan wilayah laut seluas lebih dari 5,8 juta km², Indonesia mempunyai potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Potensi yang besar ini, tidak hanya penting didalam menyediakan asupan protein hewani bagi lebih dari 270 juta penduduknya, namun juga turut memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional melalui perputaran ekonomi di sektor kelautan dan juga penciptaan lapangan pekerjaan. Meskipun demikian, pengelolaan perikanan laut yang berkelanjutan menjadi tantangan yang semakin mendesak, seperti halnya banyak negara lain, perikanan laut di Indonesia menghadapi berbagai persoalan serius seperti overfishing, kerusakan ekosistem laut, serta ancaman terhadap keberlangsungan hidup nelayan tradisional. Penangkapan ikan yang tidak terkontrol dan praktik eksploitasi yang merusak lingkungan sudah banyak menimbulkan dampak negatif berupa menurunnya populasi ikan dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi bagi komunitas nelayan.

Indonesia memiliki rekam jejak yang panjang didalam mengelola sumber daya perikanan laut. Dimasa lampau, perhatian utama difokuskan pada praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Akan tetapi, seiring munculnya berbagai tantangan baru seperti overfishing, kerusakan lingkungan laut, dan degradasi ekosistem, pendekatan dalam pengelolaan perikanan pun perlu diperluas. Dalam konteks ini, konsep blue economy semakin relevan baik dalam skala nasional maupun global. Konsep ini mencerminkan perubahan cara pandang dari eksploitasi sumber daya laut menuju pendekatan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Kebijakan perikanan global juga telah mengadopsi prinsip-prinsip blue economy. Organisasi internasional seperti PBB dan FAO telah merumuskan berbagai pedoman guna mendukung praktik pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di berbagai negara. Panduan ini turut menjadi acuan bagi Indonesia dalam mewujudkan visi blue economy.

Sebagai bentuk konkret, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan lima kebijakan utama dalam kerangka blue economy yakni penerapan penangkapan ikan terukur, pengembangan budi daya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah dipesisir maupun pulau-pulau kecil, penanggulangan limbah plastik di laut serta perluasan kawasan konversi laut. Di antara kebijakan tersebut, penangkapan ikan terukur menjadi satu diantara program prioritas. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan perikanan laut berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah mengendalikan praktik penangkapan berlebih, dengan harapan tercapainya keseimbangan antara jumlah ikan yang ditangkap dan kemampuan sumber daya ikan untuk pulih secara alami.

Kebijakan penangkapan ikan terukur ialah inisiatif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya laut. Kebijakan ini mengubah pendekatan pengelolaan perikanan yang sebelumnya berorientasi pada input control menjadi sistem output control. Dalam sistem ini, penetapan kuota tangkapan diberlakukan agar kapal yang memiliki izin tidak dapat menangkap ikan secara bebas, sehingga mencegah eksploitasi yang melebihi kapasitas sumber daya perikanan. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah kewajiban kapal berizin untuk mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan-pelabuhan yang telah ditetapkan. Dengan kebijakan ini, aktivitas pendaratan ikan tidak lagi terpusat di Pulau Jawa saja, melainkan tersebar di berbagai wilayah pengelolaan perikanan, yang diharap mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Subarsono (2008), kebijakan harus sesuai dengan nilai-nilai dan praktik sosial yang berlaku di masyarakat. Kebijakan publik merupakan peraturan atau ketentuan mengikat yang diciptakan karena adanya latarbelakang masalah atau isu yang berkembang di lingkungan masyarakat (Parsons, 2001). Sehingga dibutuhkan analisa kebijakan untuk memahami inti dari kebijakan yang mencakup informasi terkait masalah atau isu sosial yang hendak diselesaikan dan potensi dampak yang mungkin muncul akibat implementasi kebijakan tersebut (Dunn, 2004).

Implementasi kebijakan merupakan bagian krusial dalam keseluruhan proses kebijakan (Abidin, 2002). Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah proses untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, tanpa ada penyimpangan dalam pelaksanaannya (Dwidjowijoto, 2008). Menurut Hogwood dan Gun, dalam Wahab (1990), faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kebijakan biasanya terkait dengan kualitas pelaksanaannya yang buruk (*bad executive*), kebijakan itu sendiri yang kurang tepat (*bad policy*) atau bahkan faktor keberuntungan yang buruk (*bad luck*).

Kebijakan penangkapan ikan terukur ialah satu diantara inovasi penting sekaligus program prioritas yang dicanangkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan ini diatur secara resmi lewat Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023, serta diperjelas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 28 Tahun 2023 yang berisi ketentuan pelaksanaan dari peraturan pemerintah tersebut.

Kebijakan penangkapan ikan terukur ialah bentuk tanggapan dari pemerintahan Indonesia terkait permasalahan yang ada didalam pengelolaan sumber daya perikanan laut. Terdapat beberapa landasan utama yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan ini yaitu seperti dibawah ini:

- a. Sebelum diterapkannya kebijakan penangkapan ikan terukur, pengendalian perikanan di Indonesia dilakukan melalui sistem perizinan tanpa menetapkan kuota tangkapan per kapal. Dalam sistem ini, nelayan atau perusahaan perikanan memang diberikan izin untuk melakukan penangkapan, namun tidak disertai dengan batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Akibatnya, pengelolaan aktivitas penangkapan menjadi sulit dikendalikan, dan tidak ada jaminan bahwa jumlah ikan yang ditangkap masih berada dalam batas yang mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan.
- b. Race to fish Fenomena. Fenomena ini mencerminkan persaingan intensif antar pelaku usaha perikanan yang berupaya mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kualitas maupun mutu hasil tangkapan. Persaingan tersebut dipicu oleh tidak adanya sistem kuota yang membatasi jumlah tangkapan bagi setiap pelaku usaha. Pada kondisi seperti ini, pelaku industri perikanan dan nelayan cenderung berlomba-lomba memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kelestarian sumber daya perikanan di masa mendatang.
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor perikanan sebelumnya diterapkan tanpa melihat jumlah tangkapan ikan yang didapatkan. Sebelum kebijakan penangkapan ikan terukur diberlakukan, PNBP yang diberlakukan pada sektor perikanan tidak serta merta disesuaikan dengan jumlah tangkapan ikan yang didapatkan oleh perusahaan perikanan maupun nelayan. Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketimpangan, dimana beberapa pihak membayar PNBP lebih tinggi dari yang seharusnya sehingga menyebabkan kerugian, sedangkan pihak lain membayar lebih rendah sehingga menyebabkan keuntungan. Ketimpangan didalam penerapan PNBP ini menjadi satu diantara tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 mengatur beberapa beberapa hal terkait penangkapan ikan. Adapun aturan tersebut ialah seperti dibawah ini:

- a. Kouta Penangkapan Ikan ditetapkan untuk setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di perairan laut dan Laut Lepas pada Zona Penangkapan Ikan Terukur. Penentuan kouta ini didasarkan pada potensi sumber daya perikanan yang ada serta jumlah tangkapan yang diizinkan dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang ada. Kouta penangkapan ikan di zona terukur terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kouta untuk nelayan lokal, kouta untuk kegiatan yang bukan bertujuan komersial serta kouta untuk industri.

- b. Prosedur dan persyaratan pemberian kuota penangkapan ikan mencakup alokasi kuota untuk industri yang dilakukan oleh Kementerian, sementara Dinas Provinsi bertanggung jawab mengalokasikan kuota untuk nelayan lokal, khususnya nelayan kecil. Tata cara ini terdiri dari:

- 1) Pendataan kuota Penangkapan Ikan Terukur

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2023 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023, menetapkan bahwa kuota Penangkapan Ikan Terukur diberikan oleh gubernur kepada Nelayan Lokal, baik individu (termasuk Nelayan Kecil dan non-Nelayan Kecil) maupun badan usaha berbadan hukum, berdasarkan permohonan. Dalam peraturan terkait, setiap Nelayan yang telah menerima kuota Nelayan Lokal diwajibkan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di subsektor Penangkapan Ikan. Selain itu, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi pendataan kuota Penangkapan Ikan Terukur, yang mencakup pemberian, peralihan, pengurangan, penambahan, dan pencabutan kuota. Fasilitasi ini meliputi penyediaan fasilitas pendukung, pelatihan teknis, penyuluhan, serta pendampingan.

- 2) Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 juga mengatur sanksi administratif bagi setiap pihak yang tidak mematuhi peraturan terkait Kouta Penangkapan Ikan. Sanksi administratif tersebut meliputi paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan, pencabutan perizinan berusaha atau persetujuan serta peringatan atau teguran tertulis.

Provinsi Riau ialah satu diantara wilayah di Indonesia yang menghasilkan perikanan tangkap. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, pada tahun 2022 Provinsi Riau menghasilkan ikan tangkap sebanyak 114.612 Ton atau Rp2.689.285.565,-. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui kesiapan implemementasi peraturan tersebut khususnya pada daerah perikanan di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui apakah dalam implementasinya, kebijakan ini mendapat kendala. Untuk itu, peneliti ingin mengajukan penelitian yang berjudul “Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Di Kota Dumai Provinsi Riau”.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui kesiapan pemerintah Pemerintah Kota Dumai Provinsi Riau khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan dalam menghadapi rencana implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan untuk menganalisis dan mengetahui kendala pendukung Pemerintah Kota Dumai Provinsi Riau khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan dalam mengimplementasikan kebijakan penangkapan ikan terukur.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami kondisi objek penelitian berdasarkan data yang terkumpul dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk menggali fenomena yang terjadi secara mendalam melalui wawancara dan observasi, serta pendekatan kuantitatif untuk memperoleh data numerik yang dapat mendukung temuan kualitatif. Sugiyono (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam mengenai peristiwa atau fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi, motivasi, dan pandangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesiapan Kota Dumai dalam mengimplementasikan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) serta tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

Lokasi penelitian ini dipilih di Kota Dumai, Provinsi Riau, mengingat Dumai memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan merupakan salah satu pusat produksi ikan di Provinsi Riau. Penelitian ini berfokus pada kesiapan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan PIT, yang merupakan bagian dari upaya mendukung ekonomi biru di wilayah tersebut.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang melibatkan pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini antara lain adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Afrilagan, S.H., M.Si., yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan implementasi kebijakan PIT; Pengawas Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Farhan, S.Pi., M.Si., yang memahami pengawasan kebijakan di lapangan; Ketua Umum Forum Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kota Dumai, Kaharman, yang mewakili kelompok nelayan dalam konteks kebijakan ini; dan Akademisi Ilmu Administrasi Negara, Wihendri, S.Pd., M.Si., yang memahami perspektif akademis mengenai proses implementasi kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan untuk memperoleh data kualitatif yang relevan mengenai implementasi kebijakan PIT di Kota Dumai. Selain itu, observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi dan situasi di lapangan terkait perikanan dan kebijakan PIT, sehingga memperoleh data yang lebih valid dan sesuai dengan topik penelitian. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti peraturan, laporan hasil kajian kebijakan, serta prosedur yang diterapkan dalam implementasi kebijakan PIT.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dan observasi dengan informan yang dipilih. Data ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesiapan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan PIT di Kota Dumai. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai serta lembaga terkait lainnya. Data sekunder ini memberikan konteks lebih lanjut mengenai kebijakan yang sedang dianalisis dan memperkaya analisis temuan dari data primer.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penelitian ini mengikuti tahapan analisis yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari tiga langkah utama: (1) Kondensasi data, yaitu menyederhanakan dan memilih data yang relevan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memudahkan pengolahan lebih lanjut; (2) Penyajian data, yaitu mengorganisasi data yang telah dikondensasi dalam bentuk yang memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan; dan (3) Penarikan kesimpulan, di mana peneliti mencari pola, hubungan sebab-akibat, dan menguji hipotesis berdasarkan data yang telah dianalisis. Tahapan ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisasi data secara sistematis dan menarik kesimpulan yang dapat menjelaskan fenomena yang diteliti.

Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kesiapan Kota Dumai dalam mengimplementasikan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut dalam mendukung pembangunan ekonomi biru di wilayah tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

Mengidentifikasi kesiapan implementasi kebijakan adalah langkah awal yang krusial untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan lancar dan efektif. Tanpa evaluasi mendalam terhadap kesiapan sumber daya, infrastruktur, serta dukungan sosial dan politik, kebijakan berisiko tidak tercapai tujuannya atau malah menimbulkan masalah baru. Kesiapan implementasi meliputi berbagai aspek, mulai dari pemahaman dan pelatihan bagi para pelaksana hingga ketersediaan fasilitas yang mendukung. Dengan melakukan identifikasi yang tepat, hambatan yang mungkin muncul dapat diantisipasi sejak dini, sehingga kebijakan dapat dijalankan secara lebih efisien dan berdampak positif bagi masyarakat.

1. Kesiapan Pendataan Kuota Penangkapan Ikan Terukur

Kesiapan Pemerintah Kota Dumai untuk mengimplementasikan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dapat dilihat dari dua aspek utama, yakni peraturan pendukung, program pendukung dan adanya sosialisasi kebijakan. Dari sisi peraturan pendukung, Pemerintah Kota Dumai telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, yang secara spesifik mengatur mekanisme penangkapan ikan terukur. Pasal 5 dari peraturan ini mensyaratkan penggunaan alat monitoring dan sistem pencatatan data terintegrasi, yang memungkinkan setiap aktivitas penangkapan ikan dipantau secara real time. Hal ini membantu mengurangi potensi pelanggaran dan overfishing, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perikanan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai, Bapak Muhammad, menjelaskan bahwa penerapan kebijakan ini membutuhkan kerjasama yang erat antara Pemerintah Kota dan nelayan lokal. “Kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan tentang sistem penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan alat monitoring yang dapat memantau hasil tangkapan dan area tangkap secara lebih efisien,” ungkapnya. Selain itu, Bapak Muhammad juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung kebijakan ini, dengan memberikan contoh sukses implementasi kebijakan di daerah lain sebagai acuan.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga diperkuat dengan adanya program-program pendukung, seperti pelatihan intensif bagi nelayan, pengadaan peralatan monitoring modern, serta penjadwalan rapat koordinasi rutin antar instansi terkait. Program-program ini bertujuan untuk memberikan dukungan operasional yang konkret sehingga kebijakan penangkapan ikan terukur dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga penelitian dan universitas juga dilakukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Dengan adanya regulasi yang jelas dan program pendukung yang solid, kesiapan Pemerintah Kota Dumai dalam mengimplementasikan PIT menjadi lebih terjamin, meskipun ada tantangan dalam koordinasi dengan instansi pusat yang terkadang belum sinkron dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

Selain itu adanya sosialisasi kebijakan merupakan langkah penting untuk memastikan jika setiap kebijakan yang dibuat dapat dipahami, diterima, dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Tanpa sosialisasi yang efektif, kebijakan berisiko menimbulkan kebingungan, penolakan, bahkan pelanggaran karena kurangnya informasi atau pemahaman. Melalui sosialisasi, pemerintah dapat menjelaskan tujuan, manfaat, serta tata cara pelaksanaan kebijakan, sehingga tercipta dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi bukan hanya penyampaian informasi, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pembuat kebijakan dan publik demi tercapainya implementasi yang optimal. Hal ini didukung dengan pernyataan responden lainnya yaitu pengawas perikanan, yang menyatakan bahwa:

“Saya melihat kebijakan ini sebagai upaya yang positif untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Dengan adanya pengaturan jumlah tangkapan dan metode penangkapan yang lebih terstruktur, kami dapat memantau dan mencegah praktik overfishing yang selama ini merusak ekosistem

perairan” (Wawancara dengan Pengawas Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Farhan, S.Pi., M.Si., pada 26 Februari 2025)

Pernyataan tersebut menggambarkan betapa pentingnya kebijakan penangkapan ikan terukur dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Dengan diterapkannya pengaturan jumlah tangkapan, pihak pengawas memiliki kendali yang lebih baik dalam memonitor aktivitas penangkapan ikan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mencegah praktik overfishing yang berpotensi merusak populasi ikan. Langkah ini tidak bukan hanya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, namun juga membantu menjaga kesehatan ekosistem laut secara keseluruhan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.

2. Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur

Pengawasan terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur sangat penting guna memastikan bahwa pelaksanaannya sejalan dengan peraturan yang sudah ditentukan dan tidak merusak ekosistem laut. Tanpa pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, kebijakan ini berisiko disalahgunakan, misalnya melalui praktik penangkapan berlebihan atau ilegal. Pengawasan juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya perikanan dan pelestariannya, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh nelayan dan pelaku usaha. Dengan pengawasan yang efektif, tujuan utama dari kebijakan ini yaitu menjaga keberlanjutan sumber daya laut dapat tercapai secara optimal. Wawancara dengan Pengawas Perikanan Kota Dumai juga menyatakan hal yang serupa:

“Kami kekurangan alat untuk memeriksa dan merekam data hasil tangkapan nelayan secara otomatis. Saat ini, semua masih dilakukan dengan pencatatan manual dan sering kali terjadi data yang tidak akurat.” (Wawancara dengan Pengawas Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Farhan, S.Pi., M.Si., pada 26 Februari 2025)

Potongan wawancara tersebut memperkuat bahwa infrastruktur pendukung di titik-titik utama seperti pelabuhan perikanan masih sangat terbatas. Ketiadaan alat pemindai atau sensor otomatis membuat proses verifikasi hasil tangkapan menjadi tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Hal ini tentunya berpengaruh pada validitas data yang masuk ke sistem pengawasan, serta menyulitkan proses analisis kebijakan.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan penyediaan peralatan teknologi di lokasi strategis, seperti pelabuhan, yang menjadi pusat aktivitas nelayan. Integrasi antara teknologi pelabuhan dan kapal nelayan akan menciptakan ekosistem data yang lebih akurat dan dapat diandalkan dalam mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur yang berbasis data dan berkelanjutan.

Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai menyatakan bahwa:

“Anggaran yang tersedia memang masih sangat terbatas. Hal ini berdampak langsung pada pengadaan peralatan monitoring modern yang kami butuhkan untuk memantau aktivitas penangkapan secara real time, serta mengadakan pelatihan teknis yang efektif bagi pengawas dan nelayan. Akibat keterbatasan ini, upaya pengawasan dan peningkatan kapasitas menjadi kurang optimal” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Afrilagan, S.H., M.Si, pada 25 Februari 2025)

Pernyataan Pengawas Perikanan Kota Dumai menyoroti bahwa keterbatasan anggaran merupakan salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur. Tanpa peralatan monitoring yang memadai, pengawasan lapangan tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga potensi pelanggaran sulit dideteksi dan diatasi secara cepat. Keterbatasan ini juga berdampak pada kemampuan untuk mengadakan pelatihan teknis yang dapat meningkatkan kompetensi para pengawas dan nelayan, yang esensial dalam menjalankan kebijakan secara efektif.

Lebih jauh, keterbatasan anggaran menghambat investasi dalam teknologi dan inovasi yang dapat mendukung sistem pengawasan modern. Akibatnya, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia terhambat, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan. Untuk

itu, peningkatan alokasi anggaran sangat diperlukan agar semua aspek operasional, mulai dari pengadaan peralatan hingga pelatihan teknis, dapat terpenuhi dengan baik.

Potongan Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai menyatakan bahwa:

"Keterbatasan anggaran merupakan tantangan besar dalam mendukung kebijakan ini. Saat ini, dana yang tersedia belum cukup untuk menyediakan peralatan monitoring yang mutakhir dan menyelenggarakan pelatihan teknis secara menyeluruh bagi pengawas dan nelayan. Kami terus berupaya mencari solusi, seperti kolaborasi dengan lembaga swasta dan universitas, namun tantangan pendanaan tetap menjadi hambatan utama dalam upaya optimalisasi kebijakan." (Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Afrilagan, S.H., M.Si, pada 25 Februari 2025)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak pada pengadaan peralatan monitoring, tetapi juga menghambat pelaksanaan program pelatihan teknis yang krusial bagi keberhasilan kebijakan. Tanpa dukungan dana yang memadai, inovasi dan perbaikan dalam sistem pengawasan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak dapat berjalan sesuai target. Hal ini menciptakan gap antara kebijakan yang ditetapkan dengan implementasinya di lapangan, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan efektivitas keseluruhan dari kebijakan penangkapan ikan terukur.

Lebih lanjut, strategi kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga akademis yang diupayakan oleh pemerintah daerah merupakan langkah positif, namun solusi jangka panjang tetap memerlukan peningkatan alokasi anggaran. Peningkatan pendanaan akan memungkinkan pengadaan peralatan modern dan penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan, yang merupakan investasi penting untuk mendukung pengawasan yang efektif dan pencapaian tujuan kebijakan secara optimal.

Potongan wawancara dengan Nelayan menyatakan bahwa nelayan terkena dampak keterbatasan dana tersebut.

"Sebagai nelayan, saya merasakan langsung dampak keterbatasan anggaran ini. Kami seringkali tidak mendapatkan informasi dan pelatihan teknis yang cukup, karena dana untuk program tersebut masih terbatas. Begitu juga dengan peralatan monitoring, yang seharusnya membantu pengawasan dan pencatatan aktivitas penangkapan, namun keberadaannya masih sangat minim." (Wawancara dengan Ketua Umum Forum Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kota Dumai Kaharman pada 12 Maret 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan keprihatinan dari sisi praktisi di lapangan mengenai keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada ketersediaan alat dan pelatihan teknis. Tanpa adanya peralatan monitoring yang memadai, pengawasan terhadap aktivitas penangkapan menjadi tidak konsisten, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan kebijakan. Selain itu, minimnya pelatihan teknis mengurangi kemampuan nelayan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan metode penangkapan ikan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Keterbatasan sumber daya yang dialami oleh nelayan menimbulkan rasa ketidakpastian dan kekhawatiran terkait keberhasilan kebijakan penangkapan ikan terukur. Jika masalah pendanaan tidak segera diatasi, kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan praktik di lapangan akan semakin lebar, yang berpotensi menghambat upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan secara komprehensif. Dengan demikian, peningkatan anggaran untuk mendukung pengadaan peralatan dan pelatihan teknis adalah hal yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai menyebutkan bahwa: "Kami menyadari bahwa pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur masih menemui berbagai kendala, terutama terkait dengan kepatuhan yang bervariasi. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan alat bantu pengawasan yang belum memadai, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Kami terus berupaya meningkatkan koordinasi dan memperbaiki infrastruktur pendukung untuk mengatasi perbedaan tingkat kepatuhan" (Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Afrilagan, S.H., M.Si, pada 25 Februari 2025).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tantangan pengawasan dan perbedaan tingkat kepatuhan nelayan merupakan isu utama dalam implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur. Keterbatasan sumber daya manusia membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah, terutama di daerah yang sulit diakses. Di samping itu, kurangnya alat bantu modern turut menghambat upaya monitoring yang akurat, sehingga menimbulkan perbedaan penerapan kebijakan di lapangan.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai juga menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antar instansi dan perbaikan infrastruktur sebagai langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan adanya dukungan yang lebih kuat dari segi teknologi dan sumber daya, diharapkan pengawasan dapat dilakukan secara lebih konsisten dan merata, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan nelayan. Pendekatan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur dapat berjalan efektif dan berkontribusi pada pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Dari sisi nelayan, wawancara yang dilakukan memberi gambaran bahwa pengawasan yang dilakukan tidak terlalu berefek. Hasil wawancara menyatakan bahwa:

“Di lapangan, kami merasa bahwa pelaksanaan kebijakan ini bervariasi. Di beberapa wilayah yang mudah dijangkau, pengawasan sudah cukup ketat dan kami mengikuti aturan dengan baik. Namun, di daerah-daerah yang lebih terpencil, kadang-kadang pengawasan tidak konsisten, sehingga tingkat kepatuhan pun menjadi berbeda-beda.” (Wawancara dengan Ketua Umum Forum Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kota Dumai Kaharman pada 12 Maret 2025)

Pernyataan tersebut menyoroti adanya disparitas dalam pelaksanaan kebijakan antara wilayah yang mudah dijangkau dan wilayah terpencil. Variasi dalam pengawasan di lapangan menyebabkan perbedaan tingkat kepatuhan di kalangan nelayan. Di wilayah yang memiliki akses pengawasan yang lebih intensif, aturan lebih mudah ditegakkan sehingga nelayan cenderung mengikuti kebijakan dengan disiplin. Sebaliknya, di daerah yang kurang terpantau, terdapat ruang bagi perilaku yang menyimpang, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam penerapan sistem penangkapan ikan terukur. Situasi ini menggambarkan perlunya peningkatan koordinasi dan distribusi sumber daya untuk memastikan pengawasan yang merata. Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga keberlanjutan sumber daya perikanan dapat terjaga dengan baik di seluruh wilayah.

Pengawas Perikanan, sebagai stakeholder utama dalam pengawasan kebijakan ini tentunya memiliki pendapat yang cukup serupa dengan responden lainnya. Hasil wawancara dengan Pengawas Perikanan Kota Dumai menyatakan bahwa:

“Saya mengakui bahwa pengawasan lapangan saat ini menghadapi banyak kendala, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dan alat bantu yang tersedia. Di beberapa wilayah, terutama yang sulit dijangkau, kami mengalami kesulitan dalam memantau aktivitas penangkapan ikan secara menyeluruh” (Wawancara dengan Pengawas Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai Farhan, S.Pi., M.Si., pada 26 Februari 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh petugas pengawas dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia membuat pengawasan tersebar tidak merata, sehingga beberapa wilayah yang sulit dijangkau menjadi titik lemah dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, minimnya alat bantu modern yang mendukung pengawasan secara real-time juga menambah beban dalam upaya memastikan bahwa seluruh aktivitas penangkapan ikan berjalan sesuai aturan.

Kendala ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pengawasan, tetapi juga berpengaruh pada tingkat kepatuhan nelayan. Tanpa adanya monitoring yang konsisten dan dukungan alat bantu yang memadai, petugas kesulitan memberikan respons cepat terhadap pelanggaran. Situasi ini mengindikasikan

perlunya peningkatan kapasitas dan investasi dalam teknologi pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan menyeluruh.

B. Kendala Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sering menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan, seperti terbatasnya sumber daya manusia, finansial, infrastruktur, dan kapasitas teknis pelaksana Saputra, T dkk (2024). Salah satu kendala utama dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Kota Dumai adalah keterbatasan infrastruktur, terutama alat monitoring dan sistem pencatatan data yang belum memadai. Hal ini menghambat pengawasan dan evaluasi yang efektif, berpotensi mengurangi keberhasilan kebijakan, terutama dalam mendeteksi praktik overfishing. Nelayan juga menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan teknologi seperti GPS dan sistem pelaporan digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas infrastruktur dan pelatihan bagi nelayan sangat diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan secara optimal.

Selain itu, kendala sosio-kultural juga menjadi tantangan karena resistensi terhadap kebijakan baru yang tidak sesuai dengan kebiasaan tradisional nelayan. Banyak nelayan yang merasa kebijakan ini terlalu rumit dan tidak sejalan dengan metode penangkapan ikan yang telah lama mereka jalankan. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan edukatif yang melibatkan komunikasi dua arah, pelatihan langsung, serta pendampingan bagi nelayan sangat penting agar mereka dapat memahami dan mengadopsi kebijakan penangkapan ikan terukur. Meskipun ada tantangan, kebijakan ini tetap dianggap sebagai langkah positif untuk pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk mencegah overfishing dan menjaga keseimbangan ekosistem laut, sambil mendukung mata pencaharian nelayan dalam jangka panjang.

Kendala dalam proses sosialisasi sering menjadi penghambat efektifnya implementasi kebijakan, terutama ketika informasi tidak tersampaikan dengan jelas atau tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Responden nelayan lokal dalam wawancara menyatakan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur memiliki tujuan yang baik untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, namun di lapangan implementasinya masih menemui kendala, terutama soal sosialisasi dan pemahaman terhadap aturan yang baru. Banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan cara kerja sistem yang baru, sehingga terkadang ada keraguan dalam mengikutinya. Pernyataan ini menyoroti bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan melindungi kelestarian sumber daya perikanan dan mencegah kerusakan ekosistem perairan akibat overfishing, sosialisasi yang kurang memadai mengakibatkan ketidakpastian di kalangan nelayan. Hal ini mempengaruhi transisi mereka dari metode penangkapan tradisional ke sistem yang lebih modern dan berkelanjutan.

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh pejabat Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai yang mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah melakukan berbagai upaya sosialisasi melalui pertemuan, pelatihan, dan penyebaran materi informasi kepada nelayan, tingkat pemahaman di kalangan nelayan masih perlu ditingkatkan. Meskipun informasi telah disampaikan, banyak nelayan yang masih belum sepenuhnya mengerti manfaat dan mekanisme sistem baru ini, sehingga muncul keraguan dalam penerapannya. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antara upaya komunikasi yang dilakukan oleh pihak pengelola dan penerimaan informasi oleh nelayan, yang menghambat pelaksanaan kebijakan.

Tantangan implementasi kebijakan ini semakin kompleks dengan munculnya beberapa kendala lainnya yang diungkapkan oleh responden. Keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama dalam pengadaan peralatan monitoring yang masih jauh dari kebutuhan operasional. Selain itu, pelatihan teknis bagi pengawas dan nelayan juga terhambat oleh keterbatasan dana yang dialokasikan. Ketersediaan alat monitoring modern terbatas, yang mengurangi efektivitas pengawasan dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya juga menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan ini. Kesenjangan komunikasi antar lembaga

menyebabkan kesulitan dalam menyelaraskan program dan kebijakan yang harus dijalankan bersama. Hal ini mengganggu proses monitoring dan evaluasi, mengurangi sinergi antar instansi, dan memperburuk efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, resistensi perubahan di kalangan nelayan turut memperburuk penerapan kebijakan ini. Banyak nelayan yang enggan meninggalkan pola penangkapan tradisional yang sudah lama mereka jalankan. Nilai-nilai dan kebiasaan yang telah tertanam kuat dalam komunitas nelayan menyebabkan penolakan terhadap sistem baru, meskipun ada penjelasan mengenai manfaat jangka panjang dari metode terukur. Resistensi ini menghambat adaptasi dan memperlambat transisi ke sistem yang lebih modern dan berkelanjutan.

Keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, dan resistensi terhadap perubahan saling berkaitan dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur. Masing-masing tantangan ini memerlukan perhatian khusus agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Fokus pada perbaikan dalam setiap aspek, baik dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya, perbaikan koordinasi antar instansi, serta pendekatan yang lebih persuasif untuk mengurangi resistensi nelayan, dianggap sangat penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Kota Dumai.

4. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah diuraikan sejak awal hingga bagian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan dan saling mendukung. Beberapa faktor tersebut antara lain mencakup kesiapan sarana dan prasarana, tingkat pemahaman serta partisipasi aktif dari masyarakat, serta sejauh mana sistem pengawasan dan evaluasi berjalan secara efektif dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian penulis menghasilkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Dumai secara umum sudah siap mengimplementasikan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap aturan yang ada dan adanya upaya pengawasan yang dilakukan.
2. Namun demikian terdapat beberapa temuan yang berkaitan dengan kendala implementasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa meskipun aspek kelembagaan dan regulasi di Kota Dumai sudah memadai, tantangan utama terletak pada koordinasi antara instansi pusat dan daerah serta keterbatasan infrastruktur yang dapat mendukung pemantauan real time. Kurangnya sinergi antar lembaga serta kurangnya sistem informasi yang terintegrasi menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Bahwa Resistensi dari masyarakat, khususnya nelayan, terhadap perubahan pola penangkapan ikan menjadi kendala signifikan dalam implementasi kebijakan. Nilai tradisional yang kuat dalam praktik perikanan konvensional membutuhkan pendekatan edukasi dan pelatihan yang lebih intensif agar nelayan dapat beradaptasi dengan kebijakan baru yang berbasis teknologi dan sistem kuota.
 - b. Bahwa Dinas Perikanan Kota Dumai perlu memperkuat sarana dan prasarana, seperti pengembangan pelabuhan, peningkatan sistem informasi berbasis teknologi, dan pelatihan nelayan. Dengan memperkenalkan teknologi modern dan meningkatkan fasilitas operasional, implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

5. SARAN

Berdasarkan hasil temuan kendala implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Kota Dumai, didalam bagian ini peneliti ingin memberi beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian. Adapun saran yang peneliti ajukan yaitu seperti dibawah ini:

1. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Pembentukan mekanisme komunikasi yang jelas dan efisien akan meminimalkan kesalahan dalam eksekusi lapangan dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Penentuan tanggung jawab yang jelas di setiap tingkat pemerintahan dan lembaga terkait perlu diatur lebih rinci agar tidak ada tumpang tindih atau kekosongan dalam pelaksanaan kebijakan. Bahwa Dinas Perikanan Kota Dumai perlu memperkuat sarana dan prasarana, seperti pengembangan pelabuhan, peningkatan sistem informasi berbasis teknologi, dan pelatihan nelayan. Dengan memperkenalkan teknologi modern dan meningkatkan fasilitas operasional, implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, dibutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan guna menilai efektivitas kebijakan penangkapan ikan terukur. Sistem ini harus berbasis data yang akurat dan dapat memberikan feedback untuk perbaikan kebijakan secara dinamis. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dicapai kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan dan kebutuhan di lapangan.

2. Investasi dan Peningkatan Anggaran untuk mendukung Infrastruktur dan Pelatihan

Untuk mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur, sangat diperlukan investasi dalam teknologi yang mendukung pengawasan, seperti sistem informasi berbasis digital, alat pelacak GPS, dan sensor otomatis di pelabuhan serta kapal nelayan. Penerapan teknologi ini akan meningkatkan efisiensi pemantauan, pengumpulan data yang akurat, serta pengambilan keputusan yang berbasis data. Mengingat adanya resistensi dari nelayan terhadap perubahan, disarankan untuk mengembangkan program pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif. Program ini harus mencakup pelatihan penggunaan teknologi baru, pemahaman tentang kebijakan penangkapan ikan terukur, serta peningkatan kapasitas dalam beradaptasi dengan regulasi yang berlaku. Melibatkan tokoh lokal dalam proses edukasi dapat mempercepat penerimaan masyarakat terhadap perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abidin, Said Zainal. (2002). Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- [2]. Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2003). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [3]. Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- [4]. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [5]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur
- [6]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan
- [7]. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur
- [8]. Saputra, T., Nurpeni, E., & Zuhdi, S. (2024). Mapping power dynamics in local climate action: Policy networks in the climate village program of Pekanbaru City, Riau. *Chall. Sustain*, 12(4), 237-254.
- [9]. Wahab, Abdul Solichin. (2004). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara